

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Cendrawasih No. 233 Makassar (90000)
Telp. (0411) 870708 – 877021 Fax. (0411) 876223

Makassar, Januari 2019

Kata Pengantar

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini merupakan tolok ukur tingkat capaian kinerja dan akuntabilitas serta kredibilitas pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2018 sebagai pelaksanaan tahun ke-5 (lima) Renstra dalam rangka mendukung terwujudnya organisasi pemerintah daerah sebagai organisasi pembelajaran yang mengikuti kaidah-kaidah Good Governance.

Penyusunan laporan realisasi capaian program kegiatan ini merupakan bahan penyusunan LPKJ Tahunan Gubernur Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan utamanya terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah serta dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, Januari 2019

KEPALA BADAN,

Ir. H.IMRAN JAUSI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19641126 198901 1 002

Daftar Isi

A.	GAMBARAN UMUM	1
B.	DASAR HUKUM	2
C.	RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TA.2018	3
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4
	2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.....	4
	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	5
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur.....	6
	5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	7
D.	REALISASI PENCAPAIAN PROGRAM KEGIATAN	8
	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9
	II. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	11
	III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan IV. Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	16
	V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	11
	VI. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	18
E.	ASPEK KEUANGAN	22
F.	PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	24
G.	KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI	25
H.	PENUTUP	25
LAMPIRAN		

A. GAMBARAN UMUM

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan menyusun kebijakan daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menyikapi berbagai dinamika perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan bertekad menjadi lembaga terkemuka di Provinsi Sulawesi Selatan, sejalan dengan Visi Badan Diklat yakni ***”Terdepan Dalam Inovasi Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi”***. Yang dapat digambarkan bahwa **Terdepan** adalah suatu gambaran posisi/tempat yang secara obyektif dan elegan hendak dicapai dimasa yang akan datang oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sul Sel. **Inovasi** adalah kegiatan perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedalam produk barang/jasa. **Pengembangan** adalah suatu proses perubahan secara bertahap kearah tingkat yang berkecendrungan lebih tinggi, meluas dan mendalam yang secara menyeluruh dapat tercipta suatu kesempurnaan atau kematangan dan **Kompetensi** adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan didalam pekerjaannya.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2018 Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.28.213.819.290,-** yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Khusus Belanja Langsung mempunyai anggaran sebesar **Rp.13.651.488.100,-** untuk membiayai 5 (lima) program kegiatan yang selanjutnya dijabarkan dalam 32 (tiga puluh dua) kegiatan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Nomor 5 Tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12)
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Selatan.
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
15. Keputusan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/2001 tentang Pedoman Umum Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 199/XIII/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk III;
20. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk IV;
21. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 483/K.I/PDP.09 Tanggal 19 November 2018 maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. SulSel telah terakreditasi untuk melaksanakan pelatihan dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Tk. III dan IV

C. RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN T.A. 2018

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Sulawesi Selatan, maka telah ditetapkan enam program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan dan potensial yang dihadapi pada periode 2013-2018, arahan dari RPJPD Sulawesi Selatan, serta arahan dari visi RPJMN 2010-2014, visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah : “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan simpul jejaring akselerasi pada Tahun 2018”.

Rencana program kegiatan Tahun Anggaran 2018 merupakan Tahun terakhir pelaksanaan RENSTRA Tahun 2018 Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kediklatan, pengembangan dan pembinaan personil, penatausahaan administrasi kantor, barang, keuangan, penyediaan dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran penyediaan sistem informasi manajemen kediklatan, kepegawaian dan keuangan serta pengelolaan multimedia pembelajaran dalam upaya peningkatan kapasitas dan integritas sebagai lembaga diklat yang terakreditasi sehingga dapat diwujudkan profesionalisme dan kemandirian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mengelola kediklatan sesuai standar yang dipersyaratkan, dan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja serta kesejahteraan pegawai Badan. Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini terdiri dari :

- 1) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Program ini diarahkan untuk penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kediklatan serta pemeliharannya sarana dan prasarana kediklatan dalam upaya pemenuhan kelayakan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan sebagai lembaga diklat terakreditasi serta mantapnya sarana dan prasarana untuk dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga pelayanan kelembagaan dapat lebih berkualitas dan terpercaya sebagai lembaga pengelola kediklatan yang profesional dan mandiri. Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Pengembangan SDM Aparatur
 2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 3. Peningkatan Kinerja Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 5. Pemeliharaan Gedung Kampus I dan III
 6. Pemeliharaan Gedung Kampus II
- 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD**

Program ini diarahkan untuk pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan terhadap seluruh program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 melalui peningkatan dan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang direncanakan dalam program ini terdiri dari :

1. Peningkatan perencanaan program kerja badan
 2. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan
 3. Penyusunan keuangan badan
 4. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
 5. Penyusunan laporan kinerja badan
 6. Penyusunan LKj dan LPPD badan
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Penyusunan kegiatan program ini dilaksanakan dengan mengacu pada kesesuaian antara jenis program diklat dengan kebutuhan obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja pemerintahan serta sesuai dengan prinsip pengembangan organisasi modern. Selain itu

program ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan kegiatan program diklat yang dipersiapkan bagi pejabat struktural, fungsional dan kemampuan teknis pada tingkat organisasi pemerintahan di Provinsi sampai di Desa/Kelurahan sesuai amanat PP Nomor 79 Tahun 2005. Dengan adanya kesesuaian ini diharapkan diklat akan dapat meningkatkan kompetensi SDM aparatur yang memberikan kontribusi lebih besar dalam perbaikan kinerja dan produktivitas aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya jenis program diklat yang dikembangkan tersebut dikategorikan ke dalam beberapa rumpun diklat yaitu diklat teknis, diklat fungsional, Diklat Pemerintahan, diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan dan Diklat Kader. Adapun rumpun dan jenis diklat akan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan rumpun diklat kepemimpinan, diklat prajabatan dan diklat kader
- 2) Pelaksanaan rumpun diklat fungsional
- 3) Pelaksanaan pelatihan/workshop/kursus-kursus singkat
- 4) Pendampingan dan Penjaminan Mutu penyelenggaraan Diklat kepemimpinan, Diklat Prajabatan, dan Diklat Kader
- 5) Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat prajabatan Gol III, II
- 6) Pendampingan penyelenggaraan rumpun diklat teknis dan fungsional provinsi dan kab./Kota se SulSel
- 7) Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat teknis dan fungsional provinsi dan kab./kota se sulsel
- 8) Pelaksanaan rumpun diklat teknis
- 9) Pelaksanaan diklat pemerintahan
- 10) Penyelenggaraan rumpun diklat teknis, fungsional dan diklat pemerintahan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan program ini diarahkan untuk mengantisipasi dinamika perubahan manajemen kediklatan yang selama ini cenderung tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 menyebabkan bergesernya orientasi penyelenggaraan diklat baik di tingkat pusat

maupun di tingkat daerah. Jika mengacu kepada filosofi dan esensi dari UU tersebut maka pada akhirnya tingkat muara kewenangan pemerintah akan lebih banyak berada di daerah termasuk di bidang pendidikan dan latihan sehingga Pemerintah Provinsi mempunyai peran yang signifikan dalam proses aliran kewenangan tersebut. Kewenangan dibidang diklat yang belum atau tidak dilaksanakan oleh kabupaten/ kota karena keterbatasan sumber daya, akan menjadi kewenangan provinsi (sebagai fungsi fasilitasi) disamping kewenangan untuk melaksanakan diklat tertentu utamanya diklat yang sifatnya baru dan diklat yang mempunyai muatan kompetensi wawasan kebangsaan.

Kondisi ini akan mengakibatkan pergeseran pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang selama ini lebih berorientasi pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (*training delivery*) ke pengembangan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan (*training development*). Orientasi ke arah pengembangan program ini menghendaki adanya upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk melakukan kajian dan mengembangkan berbagai jenis dan kurikulum program diklat beserta disain instruksional dan modul pembelajaran, termasuk diklat spesifik/lokal, sesuai dengan analisis kebutuhan diklat (*training need analisis*) dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur yang relevan dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan memperhatikan Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Disamping itu perlunya kerjasama/kolaborasi yang sinergi dengan berbagai pihak antara lain Perguruan Tinggi, LSM ataupun komponen masyarakat lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam pelaksanaan maupun pengembangan program kediklatan utamanya dalam menetapkan program diklat baru berbasis kompetensi yang berorientasi/dapat mengatasi permasalahan kinerja yang dihadapi pada tingkat pemerintahan/unit kerja daerah dengan merumuskan kompetensi yang tidak/kurang dikuasai yang dijadikan dasar untuk pengembangan sistem pembelajaran dan rumusan tujuan diklat secara tentatif.

Sementara itu untuk menciptakan tolak ukur yang sama sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik daerah dalam penyelenggaraan program-program kediklatan, maka diperlukan upaya-upaya standarisasi, analisis serta monitoring dan evaluasi kediklatan, agar standar kualitas hasil pelaksanaan diklat tetap dapat terjaga sesuai dengan norma dan standar penyelenggaraan diklat secara umum dan dapat diterapkan secara praktis dilapangan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini terdiri dari:

1. Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kediklatan
2. Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
3. Kemitraan dan pengembangan kediklatan
4. Prmosi dan publikasi kediklatan
5. Assessment Center dan Psikologi Terapan
6. Pengelolaan media intruksional pembelajaran diklat

D. REALISASI PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3314 / X / Tahun 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp.28.213.819.290,- dan realisasi penggunaan anggaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp.27.119.353.147,- atau 96,12%. Realisasi penggunaan Anggaran ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.2562.331.190,- atau 98,09% dari rencana anggaran sebesar 14.284.116.756,- dan Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp.12.835.236.391,- atau tingkat capaian kinerja input (dana) 94,02% dari rencana anggaran sebesar Rp.13.651.488.100,- dan realisasi fisik 100% .

Belanja langsung terdiri dari 5 (lima) program kegiatan yang selanjutnya dijabarkan dalam 32 (tiga puluh dua) kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana kinerja tahunan yang ditetapkan sebelumnya dengan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.13.651.488.100,- dan terdapat realisasi

penggunaan Anggaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp. Rp.12.835.236.391,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) sebesar 94,02% dan realisasi fisik sebesar 100% setelah dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) maka diperoleh capaian kinerja outcome kegiatan dengan kategori **"Sangat Baik"** .

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Dalam tahun anggaran 2018, pada program ini telah dialokasikan Anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp. 1.997.048.820,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.957.401.961,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 98.01%, sedangkan tingkat capaian kinerja output 99,74% dan outcome 100%, untuk pelaksanaan 8 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.950.112.900,- dan realisasi sebesar Rp.912.438.210,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 96,03% sedangkan capaian kinerja output sebesar 99,80%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung ketersediaan jasa telepon, air, listrik, surat kabar, majalah faximile dan internet. dengan tingkat capaian kinerja outcome 100%.

2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.502.156.000,- dan realisasi sebesar Rp.501.709.700,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 99.91% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung ketersediaan peralatan kebersihan dan pembersih dengan tingkat capaian kinerja outcome 100%.

3) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.30.677.600,- dan realisasi sebesar Rp.30.638.600,- sehingga

tingkat capaian input (dana) sebesar 99.87% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung ketersediaan belanja alat tulis kantor (ATK) dengan tingkat capaian kinerja outcome 100%.

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.12.450.000,- dan realisasi sebesar Rp.12.445.000,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 99.96% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung ketersediaan belanja alat tulis kantor (ATK) dengan tingkat capaian kinerja outcome 100%.

5) Penyediaan Makanan dan Minuman

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.70.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.69.961.000,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 99,94% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung ketersediaan belanja cetak dan penggandaan) dengan tingkat capaian kinerja outcome 100%.

6) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.358.837.920,- dan realisasi sebesar Rp.357.434.151,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 99,61% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung kelancaran perjalanan dinas kedalam daerah dan keluar daerah. dengan tingkat capaian kinerja outcome 100%.

7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.72.814.400,- dan realisasi sebesar Rp.72.775.300,- sehingga

tingkat capaian input (dana) sebesar 99,95% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai) kering serta belanja pemeliharaan jaringan listrik. dengan tingkat capaian kinerja outcome 100%.

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD

Dalam tahun anggaran 2018, pada program ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 4.308.099.300,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.294.240.760,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 99,68%, sedangkan tingkat capaian kinerja output 100% untuk pelaksanaan 7 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1) Peningkatan Kapasitas Pengembangan SDM Aparatur

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 343.920.800,- dan realisasi sebesar Rp.343.890.000,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 99,99% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk kompetensi pegawai Badan dalam menunjang pelaksanaan tupoksinya melalui pengikutsertaan dalam kursus/pelatihan/sosialisasi/bintek dalam tahun 2018 dengan capaian kinerja outcome 100% dengan tingkat capaian tercapainya tingkat kompetensi PNS badan sesuai tugas-tugasnya.

2) Pembinaan Administrasi Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 87.327.000,- dan realisasi sebesar Rp.85.151.000,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 97,51% sedangkan capaian kinerja output sebesar 99,12%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk pengelolaan administrasi kepegawaian Badan yang optimal dalam mewujudkan kenaikan pangkat dan KGB serta pensiun pegawai Badan yang tepat waktu, serta tersedianya buku induk, Bezetting dan DUK Pegawai

Badan dalam tahun 2018 dengan capaian kinerja outcome 100% dengan tingkat capaian tersedianya informasi dalam rangka pembinaan karier pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3) Peningkatan Kinerja Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 1.325.955.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.325.950.500,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 100% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung tersedianya penilaian angka kredit Widyaiswara dan penilaian prestasi kerja Pegawai Badan dengan tingkat capaian outcome 100% dengan tingkat capaian terciptanya budaya disiplin kerja di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 1.302.416.450,- dan realisasi sebesar Rp.1.301.749.250,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) sebesar 99,95%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk penyediaan sarana peralatan/peralatan dan asrama dengan tingkat capaian kinerja outcome 100% dengan capaian tersedianya pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan perlengkapan kantor, pengadaan komputer, pengadaan mebeulair, pengadaan peralatan dapur, pengadaan penghias ruangan rumah tangga, pengadaan alat-alat studio, pengadaan alat-alat komunikasi, pengadaan alat-alat laboratorium, pengadaan

konstruksi/pembelian bangunan. Adapun perincian sarana/peralatan gedung kantor dan asrama sebagai berikut :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin yakni :

- ✓ Lemari arsip Informa
- ✓ Printer/Epson
- ✓ Printer /Pixma G1000
- ✓ Dispenser
- ✓ CCTV
- ✓ Meja Kerja 1 Biro
- ✓ Meja Kerja ½ Biro
- ✓ Meja TV
- ✓ Mesin Pompa
- ✓ Tempat tidur springbed
- ✓ Mesin Ketik
- ✓ Peralatan dapur
- ✓ Lemari badrop
- ✓ Lemari Kitchen set
- ✓ Lemari Pakaian 2 pintu
- ✓ Kursi home teather
- ✓ Komputer Notebook (laptop)
- ✓ Printer Epson
- ✓ Printer Canon
- ✓ Sprei
- ✓ Komputer Server
- ✓ Lemari Besi

b. Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung kantor dan bangunan

- ✓ Renovasi kamar asrama putri Lt. 1 (kampus 2) 1 paket
- ✓ Pekerjaan partisi asrama putra garuda 2 1 paket
- ✓ Renovasi dinding tembok pagar kampus 2 1 paket

- ✓ Pekerjaan Pembuatan Pos Jaga Kampus II (Bagian Belakang Gedung) (ukuran Panjang 4 m x Lebar 3 m) 1 paket
- ✓ Pekerjaan Renovasi Kamar Asrama Putri Kampus II 1 paket
- ✓ Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Asrama/Aula/Home teatre Kampus I 1 paket
- ✓ Pekerjaan Partisi Ruang Kerja Bidang-Bidang 1 paket
- ✓ Pekerjaan Pembuatan Ruang Arsip Badan Kampus II 1 paket
- ✓ Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi Ruangan Kepala Badan 1 paket

5) Pemeliharaan Gedung Kampus I dan III

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.227.951.192,- dan realisasi sebesar Rp.222.770.860,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) sebesar 97.73%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 99.65% Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk optimalnya penggunaan/pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai peruntukan dalam tahun 2018 dengan tingkat capaian kinerja outcome 100% dengan capaian berfungsinya sarana prasarana kantor dan asrama sesuai dengan peruntukannya. Adapun sarana dan prasarana yang diperbaiki dalam Tahun Anggaran 2018 antara lain :

- Pek. Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Asrama/Aula/Home Teatre Kampus I
- Pekerjaan Pemeliharaan Lift
- Biaya Perbaikan AC Kantor dan Asrama (Kampus I) Pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus I dan III
- Biaya Pemeliharaan Mesin Genset (Kampus I)
- Kayu (Kampus I) Pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus I dan III
- Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Landscape (Kolam,Tanaman) Kampus I Melalui Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus I dan III
- Biaya Pemeliharaan Air Bersih Gedung dan Asrama (Kampus I) Melalui Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus I dan III
- Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (Kampus I) Melalui Pemeliharaan Gedung Kampus I dan III

- Biaya Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik Kantor Kampus I Melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- pemeliharaan perbaikan lemari pakaian asrama garuda

6) Pemeliharaan Gedung Kampus II

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.574.588.858,- dan realisasi sebesar Rp.574.234.650,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) sebesar 99,94%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%.

Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk optimalnya penggunaan/pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai peruntukan dalam tahun 2018 dengan tingkat capaian kinerja outcome 100% dengan capaian berfungsinya sarana prasarana kantor dan asrama sesuai dengan peruntukannya. Adapun sarana dan prasarana yang diperbaiki dalam Tahun Anggaran 2018 antara lain :

- ☞ Biaya Perbaikan AC Kantor dan Asrama Kampus II Pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus II
- ☞ (Kampus II) Pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus II
- ☞ Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus II
- ☞ Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Pembuangan Air Limbah/Kotor Kampus II Melalui Pemeliharaan Gedung Kampus II
- ☞ Biaya Pemeliharaan Air Bersih Gedung dan Asrama Kampus II Melalui Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kampus II
- ☞ Biaya Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik Kantor Kampus II Melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ☞ pemeliharaan alat komunikasi kampus II
- ☞ Pemeliharaan alat studio LCD Proyektor
- ☞ Pemeliharaan komputer
- ☞ Biaya Pemeliharaan Mesin Fotocopy

- ☞ Biaya Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik Kantor Kampus II Melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ☞ Pek. Pemeliharaan Landscape (kolam, tanaman) Kampus II (Perubahan)
- ☞ Pek. Pemeliharaan Ruang Perpustakaan (Perubahan)
- ☞ Pek. Perbaikan dan Pemeliharaan Ruang Widyaiswara Kampus II
- ☞ Pek. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Asrama Kampus II
- ☞ Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Landscape (Kolam,Tanaman) Kampus II

7) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.445.940.000,- dan realisasi sebesar Rp.440.494.500,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) sebesar 98.78%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk optimalnya penggunaan/pemanfaatan kendaraan operasional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi sesuai peruntukan dalam tahun 2018 dengan tingkat capaian kinerja outcome 100% dengan capaian berfungsinya sarana prasarana kantor dan asrama sesuai dengan peruntukannya. Adapun kendaraan operasional yang diperbaiki dalam Tahun Anggaran 2018 antara lain :

- ☞ Biaya reparasi dan penggantian onderdil (7 Mobil)
- ☞ Biaya Pemeliharaan Accu dan Ban (3 Mobil)
- ☞ Biaya reparasi dan penggantian onderdil motor (6 motor)
- ☞ Biaya pemeliharaan Accu dan Ban (6 Motor)

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD

Dalam tahun anggaran 2018, pada program ini telah dialokasikan anggaran jumlah perubahan APBD sebesar Rp. 888.540.500,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 885.989.550,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) adalah sebesar 99.71%, sedangkan tingkat capaian output

sebesar 100% dan outcome sebesar 100% dengan capaian tersedianya dukungan informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja pelaksanaan anggaran kegiatan badan serta tersedianya hasil capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan badan tahun 2018.

Adapun penjelasan pelaksanaan kegiatan dalam program ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Perencanaan Program Kerja Badan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 424.841.000,- dan realisasi sebesar Rp. 423.434.300,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 99,67% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung tersedianya dokumen perencanaan Tahunan Badan melalui Penyusunan Renja 2018, KUA dan PPAS, RKA dengan tingkat capaian kinerja outcome 100% dengan tingkat capaian tersedianya dokumen perencanaan tahunan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyusunan Renja, KUA PPAS Perubahan 2018, KUA PPAS Pokok 2018, RKA Perubahan 2018, RKA Pokok 2019 dan DPA

2. Pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 245.923.500,- dan realisasi sebesar Rp. 245.335.250,- sehingga tingkat capaian input (dana) sebesar 99,76% sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas melalui dukungan administrasi dan penatausahaan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta tercapainya tertib administrasi keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tingkat capaian kinerja outcome 100% dengan tingkat capaian tercapainya tertib administrasi keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 49.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 48.969.000,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) sebesar 99,94%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100% serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian Tersedianya Dukungan Informasi dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Badan.

4. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Diklat

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.136.657.200,- dan realisasi sebesar Rp. 135.832.200,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) 99.61%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100% serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian Tersedianya informasi hasil pelaksanaan program kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi Tahun 2018.

5. Penyusunan LKj dan LPPD Badan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.32.418.800,- dan realisasi sebesar Rp. 32.418.800,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) 100%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100% serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian tersedianya hasil capaian kerja pelaksanaan program kegiatan badan tahun 2018 melalui laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2018.

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Dalam tahun anggaran 2018, pada program ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 5.801.526.680,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.064.832.340,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) adalah sebesar 87.30% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 99,31% dan outcome sebesar 100%. Adapun Pelaksanaan

program ini yang terbagi dalam 10 kegiatan kediklatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan dan Diklat Kader

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.903.680.500,- dan terdapat realisasi penggunaan anggaran sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.646.151.500,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 94,75% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 99,45% dan outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya tingkat kompetensi sesuai jenis/jenjang diklat yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Diklat Kepemimpinan Tk. II sebanyak 1 angkatan/55 orang
2. Diklat Kepemimpinan Tk. III sebanyak 3 angkatan /120 orang
3. Diklat Kepemimpinan Tk. IV sebanyak 3 angkatan/120 orang
4. Diklat Latsar sebanyak 2 angkatan/76 orang
5. Diklat Revolusi Mental sebanyak 2 angkatan / 60 orang

2) Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD 2018 sebesar Rp. 31.574.000,- dan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp. 31.574.000,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 100% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 100% dan outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya tingkat kompetensi sesuai jenis/jenjang diklat Fungsional 1 jenis diklat/1 angkatan dengan jumlah alumni 30 orang dari target 30 orang yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Workshop Penghitungan Angka Kredit Untuk Fungsional Tertentu sebanyak 1 angkatan/30 orang

3) Pendampingan dan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan dan Diklat Kader

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 191.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 148.899.000,-

sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) 77,84% dan capaian kinerja output sebesar 93,23% serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian Terjalannya simpul kerjasama mengenai koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan dan Diklat Kader Provinsi dan Kab/Kota yang sinergis.

4) Pendampingan Penyelenggaraan Rumpun Diklat Teknis dan Fungsional Provinsi dan Kab./Kota se Sul Sel

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 60.082.408,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.528.040,- sehingga tingkat capaian kinerja input (dana) 95,75% dan capaian kinerja output sebesar 99,89% serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian Terjalannya simpul kerjasama mengenai koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional dan Kab/Kota yang sinergis.

5) Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis

Pada kegiatan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.131.167.500,- dan realisasi penggunaan anggaran sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp. 131.167.500,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 100% sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 100% dan outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya tingkat kompetensi sesuai jenis/jenjang diklat teknis 2 jenis diklat dengan jumlah alumni 90 orang yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Workshop Tata Naskah Dinas 1 angkatan / 30 orang
2. Workshop Keprotokolan 2 angkatan / 60 orang

6) Pelaksanaan Rumpun Diklat Pemerintahan

Pada kegiatan ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD 2018 sebesar Rp. 49.512.300,- dan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp. 49.512.300,- sehingga tingkat capaian kinerja input sebesar 100% sedangkan

tingkat capaian kinerja output sebesar 100% dan outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya tingkat kompetensi sesuai jenis/jenjang diklat teknis 1 jenis diklat dengan jumlah alumni 30 orang dari target 30 orang yang dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Workshop Penyusunan RPJMDes 1 angkatan / 30 orang

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR.

Dalam tahun anggaran 2018, pada program ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 656.236.800,- dan terdapat realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 632.771.780,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) program sebesar 96.42%, sedangkan tingkat capaian kinerja output sebesar 99,85% dan outcome 100% untuk pelaksanaan 7 kegiatan yaitu :

1. Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kediklatan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.248.109.000,- dan realisasi sebesar Rp.247.176.560,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 99,62%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya kualitas penyelenggaraan diklat sesuai standar SMM 9001:2008.

2. Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.55.079.000,- dan realisasi sebesar Rp.46.918.100,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 85.18%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 99.25%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam penyusunan AKD bagi aparat SKPD Prov.SulSel

3. Kemitraan dan pengembangan kediklatan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.56.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 56.393.900,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana), output sebesar 99.02%. Sedangkan capaian kinerja output sebesar 100% serta tingkat capaian kerja Outcome sebesar 100% dengan capaian Terwujudnya peningkatan jaringan kemitraan dan pengembangan kediklatan.

4. Promosi dan Publikasi Kediklatan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.156.055.000,- dan realisasi sebesar Rp. 149.417.000,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 95.75%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 99,84%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya buletin inovasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia prov. Sul sel, serta tercapainya sarana informasi kediklatan yang berkualitas mengenai eksistensi & kapabilitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia prov. Sul Sel baik untuk publik maupun kalangan internal.

5. Monitoring dan Evaluasi Kediklatan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.32.200.500,- dan realisasi sebesar Rp.32.172.920,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 99,91%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian Tercapainya hasil monev. Bagi peserta diklat.

6. Pengelolaan Media Instruksional pembelajaran Diklat

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp.107.843.300,- dan realisasi sebesar Rp. 100.693.300,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 93,37%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 99.79%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian terwujudnya daya dukung pembelajaran media instruksional pembelajaran diklat

E. ASPEK KEUANGAN

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah TA. 2018

Realisasi Anggaran Pendapatan yang dicapai pada tahun 2018, Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan target Rp. 595.779. 500,- dengan realisasi sebesar Rp.709.219.500,- atau sebesar 119,04% sedangkan untuk penerimaan Retribusi Jasa Umum (RJU) Target sebesar Rp.7.858.260,- dengan realisasi sebesar Rp.6.747.356.000,- atau 85,86% sehingga Total Pendapatan Tahun 2018 adalah sebesar Rp.7.456.575.500,-.

2. Penggunaan Anggaran (Belanja) APBD TA. 2018

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan SDM, maka berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan dukungan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.28.213.819.290,- dan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.27.119.353.147,- atau 96,12%.

a. Realisasi Penggunaan Anggaran Menurut Program Kegiatan

Realisasi penggunaan anggaran tersebut diuraikan menurut 5 program dan 32 kegiatan ditambah Belanja Tidak Langsung. Rincian realisasi penggunaan anggaran menurut program kegiatan tersebut telah diuraikan pada bab sebelumnya.

b. Realisasi Penggunaan Anggaran menurut kelompok belanja, jenis dan rincian obyek belanja sebagai berikut :

Rencana dan Realisasi APBD
Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulsel
Tahun Anggaran 2018

No	U R A I A N	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen-tase (%)	Sisa Anggaran (Rp)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.562.331.190	14.284.116.756	98,09	278.214.434
1.	Gaji dan Tunjangan	7.811.181.450	7.621.053.910	97,57	190.127.540
2.	Tambahan Penghasilan PNS	6.751.149.740	6.663.062.846	98,70	88.086.894
B.	BELANJA LANGSUNG	13.651.488.100	12.835.236.391	94,02	816.251.709
1.	Belanja Barang dan Jasa	12.379.448.900	11.563.798.091	93,41	815.650.809
2.	Belanja Modal	1.272.039.200	1.271.438.300	99,95	600.900
JUMLAH ANGGARAN		28.213.819.290	27.119.353.147	96,12	1.094.466.143

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Badan Pengembangan SDM Prov. Sulsel , 31 Des. 2018

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Identifikasi permasalahan kediklatan tidak terlepas dari konsep Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (*Human Resources Development/HRD*) di Provinsi Sulawesi Selatan dan setelah dilihat dari berbagai aspek kediklatan, maka permasalahan yang sedang dan mungkin kita hadapi dengan diberlakukannya desentralisasi kediklatan adalah sebagai berikut :

1) Masalah-masalah yang dihadapi

- a) Terbatasnya regulasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pengembangan SDM
- b) Adanya lembaga kediklatan regional / kementerian / Lembaga di daerah
- c) Rendahnya anggaran terhadap kebutuhan penyelenggaraan diklat.
- d) Terbatasnya tenaga fungsional Widyaiswara untuk pendidikan dan pelatihan teknis

2) Pemecahannya

- a) Perlunya regulasi untuk penyusunan norma standar prosedur dan kriteria pengembangan SDM
- b) Pelaksanaan akreditasi diklat oleh LAN RI
- c) Perlunya peningkatan anggaran terhadap penyelenggaraan kediklatan yang lebih luas dan spesifik
- d) Peningkatan penyediaan tenaga fungsional Widyaiswara khususnya untuk pendidikan dan pelatihan teknis.

G. KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja yang menggembirakan diantaranya yaitu :

- ✓ Sertifikat Penghargaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai peserta dalam acara Pameran Pembangunan Sul-Sel EXPO Tahun 2018 Gubernur Sulawesi Selatan (Makassar, 12 Agustus 2018).

H. PENUTUP

Laporan realisasi capaian pelaksanaan program kegiatan merupakan Akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Wajib Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEPALA BADAN,

Ir.H. IMRAN JAUSI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19641126 198901 1 002